

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena Reformasi Birokrasi yang bergulir menuntut perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi wacana publik yang menuntut pengalokasian dan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah. perumusan itu mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, Berdasarkan undang- undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah.

Adanya pemberian otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan Pengalihan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis jenis pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada daerahnya. Berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,

mengacu kepada peraturan daerah jawa barat nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah disebutkan salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor.

Pada penjelasan pajak kendaraan bermotor ditetapkan peraturan pajak kendaraan bermotor progresif, yaitu tarif pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan persentase yang naik dengan banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki sebagai dasar pengenaan pajak. Pajak kendaraan bermotor progresif dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan lebih atas kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan bermotor.

Kebijakan tentang pajak progresif harus di implementasikan atau dilaksanakan dengan baik agar menghasilkan efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor asli daerah, menurut **Meter dkk**, dalam **agustino (2012:139)** implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Begitu juga menurut **Siswanto (2007:55)** mengartikan bahwa efektivitas adalah kemampuan memilih sasaran yang tepat. Maka bilamana kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan maka akan mencapai efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor progresif.

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan merupakan unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pendapatan Daerah, yang mempunyai visi “ Menjadi pengelola pendapatan

daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik”.

Adapun misi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi
4. Menjalin jejaring kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah

Berdasarkan hasil pengamatan di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah Bandung II Kawalayaan, peneliti menemukan permasalahan yang dihadapi yaitu efektivitas penerimaan dilihat dari pelayanan yang masih belum efektif, indikator efektivitas alat ukur sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan yang ingin dicapai boleh Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan merupakan keseluruhan upaya yang dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan. Upaya pencapaian tujuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan cukup optimal karena target penerimaan dalam pajak kendaraan bermotor lebih meningkat setelah diberlakukannya pajak progresif, tetapi dalam pelayanan pemanfaatan waktu dalam memberikan pelayanan belum efisien hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang mengeluhkan lamanya proses pelayanan, keterlambatan dalam pelayanan.

b. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dengan berbagai macam organisasi-organisasi yang menyangkut proses sosialisasi. Masih belum optimalnya proses sosialisasi yang ada, sosialisasi yang masih kurang efektif kepada masyarakat, banyak masyarakat yang belum mengetahui untuk apa pajak progresif ini diberlakukan dan seperti besaran tarif pajak progresif. adapun permasalahan dalam prosedur pelayanan, dengan diberlakukannya pajak progresif secara otomatis loket pembayaran akan bertambah yaitu loket progresif juga beberapa prosedur yang harus dilakukan seperti pengecekan ulang jumlah kendaraan hal ini menyebabkan banyak wajib pajak progresif enggan untuk menempuh prosedur yang ada akibatnya wajib pajak lebih mempercayakan pembayaran kepada pihak ke 3 seperti biro jasa untuk mewakili. proses

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti menduga bahwa rendahnya efektivitas penerimaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Sumberdaya

Sumberdaya yang menunjang proses pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah staff tidak hanya harus handal atau berkompeten saja melainkan kurangnya jumlah staff pemberi layanan sehingga memanfaatkan waktu pelayanan belum terlaksana secara efisien dan efektif

b. Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi belum terlaksana dengan baik, koordinasi disini berarti kerjasama antara semua pihak baik berupa proses sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut, untuk itu peneliti mengadakan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk ke dalam laporan yang berjudul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah Bandung II Kawalayaan.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah Bandung II Kawalayaan.

3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah Bandung II Kawalayaan.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memperoleh data dan informasi yang sebenarnya mengenai pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak.
- b. Mengetahui bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak.
- c. Mengetahui hambatan-hambatan tentang pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak.
- d. Mengembangkan data dan informasi mengenai pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan.

b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk semua yang memerlukan teori implementasi kebijakan dan efektivitas penerimaan pajak di lingkungan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
- 2) Memberikan bahan masukan mengenai pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak.

D. Kerangka Pemikiran

Bertitik tolak dari latar belakang serta perumusan masalah, peneliti menggunakan kerangka fikir yang dapat dijadikan landasan teori, dalil dan pendapat dari para pakar berhubungan dengan variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah: implementasi kebijakan (variabel bebas) dan efektivitas penerimaan (variabel terikat).

Teori dari pendapat para ahli mengenai kebijakan publik, menyangkut kebijakan tersebut banyak ahli yang menyamakan arti kebijakan dengan kebijaksanaan sebagai terjemahan dari kata policy. **Friederich** menyatakan pengertian kebijakan yang dikutip oleh **Agustino (2012:7)** yaitu:

Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan- hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kemungkinan- kemungkinan (kesempatan- kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan teori diatas penulis berpendapat bahwa kebijakan merupakan bagian dari tindakan dengan maksud dan tujuan tertentu , kebijakn melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalb am beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Proses kebijakan aspek yang sangat penting yaitu Implementasi kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh **Dunn** yang diterjemahkan oleh **Samodra. Dkk (2003:80)** bahwa : **“implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan”**.

Model implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dikembangkan oleh **Edward** yang dikutip oleh **Agustino (2012:149)** sebagai berikut: **“1.) komunikasi; 2.) sumber daya; 3.) disposisi; 4.)struktur birokrasi”**.

Kemudian peneliti akan mengemukakan juga pengertian efektivitas oleh **Handayaniingrat (1996:16)** sebagai berikut: **“Efektivitas pengukuran dalam arti tercapainya sasaran tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”**

Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan keberhasilan organisasi dalam pencapaian suatau tujuan tertentu dengan menggunakan sumber- sumber yang ada dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya.

Landasan teoritis berikutnya mengenai efektivitas yang dikemukakan oleh **Emerson** dalam **Handyaningrat (1985:16)** yaitu:

Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak.

Pendapat ahli di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian tujuan atau sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat **Duncan** dalam **Steers (1980:50)** yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu:

1. **Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari factor yaitu : kurun waktu , dasar hukum, dan sasaran yang merupakan target konkret.**
2. **Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus, prosedur dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi menyangkut proses sosialisasi.**
3. **Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan faktor peningkatan kemampuan, proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.**

Efektivitas dilihat dari aspek penerimaan pajak didalam organisasi dan manajemen berarti keberhasilan atau kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diukur berdasarkan pendekatan proses dan hasil. Menurut **Nugroho (2003:179)** mengemukakan bahwa: “**efektivitas organisasi**

implementasi kebijakan mencakup empat tepat yaitu tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat targetnya dan tepat lingkungannya”.

Kebijakan dapat dikatakan diimplementasikan secara efektif jika benar dan menimbulkan dampak atau perubahan perubahan positif sebagaimana yang diharapkan seperti meningkatnya penerimaan pajak.

Berdasarkan teori- teori menurut para ahli diatas, peneliti mengidentifikasi bahwa implementasi kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor progresif ada hubungan atau pengaruh, keterkaitan dengan efektivitas penerimaan pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan di Wilayah Bandung II Kawalayaan.

E. Hipotesis

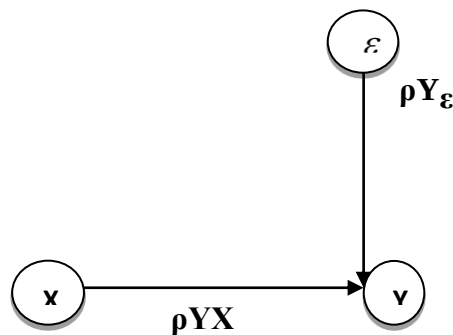
Bertitik tolak dari kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut : **“Ada pengaruh antara Implementasi tarif pajak kendaraan bermotor progresif Terhadap Efektivitas Penerimaan Di Cabang pelayanan dinas pendapatan Provinsi Wilayah Bandung II Kawalayaan”**

Berdasarkan hipotesis tersebut maka peneliti akan mengemukakan definisi operasional, sebagai berikut :

1. $H_0 : \rho_s \leq 0$ = implementasi kebijakan: efektivitas penerimaan < 0 ,
implementasi kebijakan (X) efektivitas penerimaan (Y) artinya
implementasi kebijakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak kendaraan
bermotor tidak ada pengaruh yang signifikan.

2. $H_1 : \rho_s > 0$ = implementasi kebijakan: efektivitas penerimaan > 0 ,
 implementasi kebijakan (X) efektivitas penerimaan (Y) artinya
 implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan
 bermotor ada pengaruh yang signifikan.

3. Berikut ini peneliti uraikan paradigma penelitian :



Gambar 1.1.
Paradigma Penelitian

Keterangan dari gambar 1.1 :

X = Implementasi kebijakan

Y = Efektivitas penerimaan pajak

ε = Variabel dari luar variabel implementasi kebijakan yang tidak diukur yang mempengaruhi variabel efektivitas penerimaan.

$\rho^{\varepsilon Y}$ = Hubungan di luar variabel implementasi kebijakan yang mempengaruhi variabel efektivitas penerimaan.

ρ^{XY} = Hubungan antara variabel implementasi kebijakan dengan variabel efektivitas penerimaan

Berdasarkan hipotesis diatas, Peneliti mengemukakan definisi operasional dari hipotesis yang telah dirumuskan diatas, sebagai berikut :

- a. Implementasi kebijakan peraturan tarif pajak progresif adalah tindakan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jabar Cabang Bandung Tengah dalam melaksanakan pungutan pajak kendaraan bermotor progresif. (X)
- b. Efektivitas adalah pengukuran dalam hal ini sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai semua sasarannya dilihat dari jumlah, kualitas dari jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

F. Lokasi dan lamanya penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, Jl.Kawalayaan Raya Bandung.

2. Lamanya Penelitian

Mengenai lamanya penelitian dilakukan mulai dari tahap penjajagan pada 14 November 2014 sampai dengan 30 desember 2014. Kemudian tahap penelitian selama 6 bulan dari tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan bulan 19 Juni 2015